

## Resep Taiwan Hadapi Covid-19 Sebagai Formula Strategis Meraih Kepentingan Nasional

Harisah 'Aini Auliya

Universitas Indonesia

Correspondence email: harisah.aini@ui.ac.id

**Abstrak.** Penanganan COVID-19 di Taiwan dinilai sebagai penanganan terbaik mengingat letak geografisnya dan interaksinya yang sangat dekat dengan asal virus, Cina. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, menjelaskan kejadian Covid-19 dari episentrumnya dan wilayah terdekatnya, Taiwan. Penulis ingin mengkaji pendekatan yang dilakukan Taiwan untuk menahan jumlah paparan Covid-19 meski dekat dengan sumber awal wabah ini saat berada di bawah tekanan *One China Policy*. Serangkaian kebijakan Taiwan menunjukkan kombinasi transparansi demokratis dan penegakan hukum yang ketat untuk menjaga stabilitas negara di bawah kepentingan nasional dan proteksionisme merkantil. Ada tiga langkah utama yang telah diambil Taiwan untuk menangani wabah yang dapat menjadi contoh kebijakan yang efektif; Pencegahan dini, Pemaksimalan Big Data dan Dukungan Pemerintah yang Nyata.

**Kata kunci:** Big Data; Covid-19; Demokrasi; Proteksionisme; Taiwan.

**Abstract.** The handling of COVID-19 in Taiwan is considered the best treatment considering its geographical location and its very close interaction with the origin of the virus, Cina. The author uses a descriptive qualitative method, explaining the occurrence of Covid-19 from its epicenter and its closest area, Taiwan. The author wants to examine the approach taken by Taiwan to contain the number of Covid-19 exposures even though it is close to the initial source of this outbreak while it is under pressure from *One China Policy*. Taiwan's set of policies demonstrates the combination of democratic transparency and strict law enforcement in order to maintain state stability under national interests and mercantilist protectionism. There are three main steps that Taiwan has taken to deal with the outbreak that can serve as examples of effective policies; Early prevention, Big Data Maximization and Real Government Support.

**Keywords :** Big Data; Democracy; Covid-19; Protectionism; Taiwan.

### PENDAHULUAN

Seluruh negara di dunia mengalami dampak wabah Covid-19 terhadap stabilitas negara. Cina sebagai episentrum virus Covid-19 pertama kali menunjukkan respons yang sama cepatnya dalam menekan penyebaran virus dan mulai memberikan bantuan ke negara lain. Cina memang negara pertama yang mengalami wabah pandemi, namun jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak berasal dari Amerika, di bawahnya kawasan Mediterania Eropa, kawasan Mediterania Timur, sedangkan Asia Tenggara menjadi kawasan ke-4 di dunia. Diikuti oleh kawasan Afrika dengan kasus di peringkat terakhir. Gambar 1 menjelaskan terjadi beberapa peningkatan dan peningkatan kasus setiap harinya hingga tanggal 18 Juni 2020.

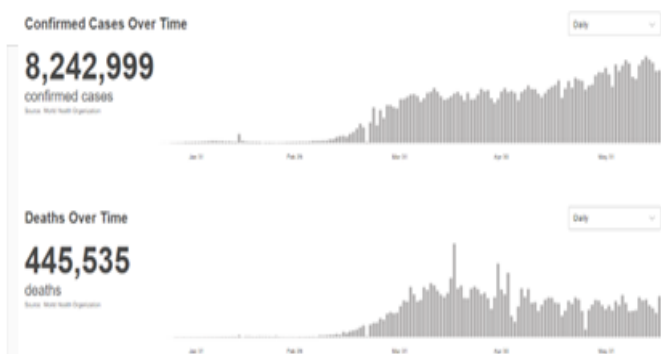
Sumber: WHO (2020) WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard

#### Gambar 1

Total Kasus Terkonfirmasi COVID-19 dan Angka Kematian Kasus Covid-19 di Seluruh Dunia

Sebagai akibat dari perubahan tersebut, negara didorong untuk mengerahkan segala upaya untuk ketahanan negara. Beberapa negara dinilai lebih cepat dalam menangani penyebaran virus, namun secara keseluruhan negara-negara di dunia menghadapi COVID-19 untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, langkah penanganan negara yang pernah mengalami pandemi virus atau teknologi yang lebih memadai akan ditonjolkan dan dijadikan rekomendasi bagi negara yang baru mengalaminya. Tidak hanya penanganan yang gesit dan tepat, namun kerjasama regional dan internasional juga diperlukan. Tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikan masalah pandemi ini sendirian. Perlu adanya kesadaran global, sinkronisasi pencegahan di tingkat domestik dan antar negara, program dan kebijakan untuk saling membantu, sebagaimana dikutip dari artikel Sekjen PBB António Guterres "*COVID-19: We will come through this together*"

Perbedaan ukuran negara, implementasi kebijakan dan kemampuan teknologi dan ekonomi negara memiliki pengaruh terhadap penanganan wabah



pandemi. Beberapa masalah utama bagi negara-negara di dunia, tidak hanya di ASEAN, adalah kombinasi disharmonis dan kurangnya kesiapan pemerintah karena tidak menganggap serius ancaman wabah COVID-19 sejak dini. Bahkan Jepang dan Cina mengalami hal yang sama tentang keterlambatan mendeteksi dan mencegah penyebaran di awal pandemi, Jepang punya cerita menarik dalam penanganan COVID-19 sedangkan di negara maju yang sangat tertib, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkesan lamban dan tidak selaras dengan pemerintah daerah. Yang pertama menyatakan keadaan darurat adalah Gubernur Hokkaido pada 28 Februari, PM Abe terlambat menetapkannya pada 7 April dan yang pertama menyerukan penguncian adalah Gubernur Tokyo, Koike. Begitu juga dengan Indonesia yang banyak mendapat imbauan untuk menyatakan COVID-19 sebagai epidemi nasional.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani penyebaran COVID-19 tidak konsisten, tidak transparan, dan menyebabkan kontraksi komunikasi, terutama antar lembaga negara yang berwenang menangani masalah ini. Sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tidak harmonis dan terkesan saling berbenturan diperparah dengan kurangnya diplomasi komunikasi untuk menenangkan dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Harus memilih antara dampak ekonomi yang masif dan dampak kesehatan yang merenggut nyawa. Negara ini dihadapkan pada dua pilihan yang sangat melelahkan dan bahkan mencengangkan untuk sekedar mengembalikan kondisi ke keadaan semula apalagi menjadi lebih baik. Ketersediaan sumber daya dan infrastruktur (termasuk peralatan kesehatan dasar) yang dapat dimobilisasi untuk menghadapi krisis tidak memadai. Penyebarannya begitu cepat dan luas sehingga negara ini kekurangan tenaga medis dan peralatan serta obat-obatan yang diperlukan.

Negara yang hanya berjarak 81 mil (130,357 km) di lepas pantai daratan Tiongkok dan diperkirakan memiliki jumlah kasus penyakit virus corona tertinggi kedua di tahun 2019 (COVID-19) karena kedekatannya dan jumlah penerbangan ke Tiongkok (Wang, 2020). Pada 2019, 2,71 juta pengunjung dari daratan melakukan perjalanan ke Taiwan (Wang, 2020) Sekitar 850.000 dari 23 juta warga Taiwan tinggal di daratan Cina, dan 400.000 bekerja di sana (Pan, 2019). Selat Taiwan antara pulau dan daratan hanya berjarak 130 km. Dapat disimpulkan, Taiwan berada di tengah wabah virus corona yang besar. Sebaliknya, pada 18 Maret, hanya ada 100 kasus dibandingkan dengan lebih dari 80.000 di Cina dan puluhan ribu di beberapa negara Eropa. Australia dan Taiwan memiliki populasi yang hampir sama yaitu sekitar 24 juta orang, keduanya merupakan negara kepulauan yang mengontrol apapun yang melintasi perbatasan mereka, keduanya juga memiliki hubungan perdagangan dan transportasi yang kuat dengan daratan Cina. Sepuluh minggu dari 25 Januari - tanggal ketika negara-negara baru mulai menyadari

bahaya virus - Australia memiliki hampir 5.000 kasus yang dikonfirmasi, sementara Taiwan memiliki kurang dari 400. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Taiwan mengendalikan virus ketika seluruh dunia tertatih menghadapinya.

#### *Tinjauan Pustaka*

Penelitian tentang penanganan Covid-19 bervariasi dari berbagai latar belakang disiplin ilmu mulai dari ilmu kesehatan hingga kebijakan publik. Kebijakan suatu negara dalam menyelidiki dan menekan Covid-19 telah menarik perhatian banyak peneliti dari seluruh dunia. Sebagian besar artikel yang beredar secara internasional menyoroti respon cepat dan sinergi pemerintah Taiwan dan sektor swasta dalam memerangi pandemi ini, selain menyanggah sikap WHO yang seolah mengabaikan Taiwan dan masukan-masukannya. Wei-Ting (2020) membahas alasan di balik tanggapan efektif Taiwan tidak hanya dari pengalaman SARS-nya tetapi terletak pada kebijakan masker, penggunaan teknologi untuk meningkatkan pencegahan dan deteksi, dan transparansi komunikasi hubungan negara-masyarakat. Namun, tidak ada pandangan dari aspek kepentingan nasional yang diambil Taiwan dalam menangani pandemi dalam pembahasannya, yang penting mengingat semua kebijakan dipengaruhi oleh kondisi politik dan geografis Taiwan.

Hsieh (2001) membahas lebih banyak elemen pemerintahan dengan model pemerintahan kolaboratif untuk menggali sinergi kolektif antara pemerintah dan masyarakat yang bersama-sama memerangi Covid-19. Ia memaparkan kerjasama antara anggota Tim Nasional Penanggulangan Epidemi, yaitu; pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat. Siedlok (2022) menyoroti saling ketergantungan yang terkoordinasi dengan baik antara lembaga-lembaga negara dan sektor swasta. Akibatnya, respons industri yang efektif membutuhkan tindakan dari tiga domain; negara, kerjasama bisnis-pemerintah, dan kerjasama antara perusahaan swasta. Penulis ingin melengkapi literatur yang ada dengan memasukkan unsur proteksionisme yang dilakukan oleh Taiwan beserta transparansi dalam penggunaan Big Data. Apa yang dilakukan Taiwan secara praktis merupakan kombinasi dari beberapa konsep kebijakan di bawah payung kepentingan nasional. Jika melihat tindakan tegas negara untuk menutup dan memberlakukan larangan bepergian dari lokasi tertentu, ini sering dikatakan sebagai ukuran proteksionisme negara. Hal ini diperlukan mengingat situasi dan kondisi Taiwan saat itu yang sangat berisiko terpapar virus dari negara daratan, Cina. Begitu juga dengan banyak negara lain yang telah melakukan kebijakan ini dalam mencegah masuknya virus. Negara yang mendeteksi adanya ancaman dari luar negeri cenderung melakukan tindakan proteksionis untuk menjaga stabilitas domestik. Ide proteksionisme tidak dapat dipisahkan dari merkantilisme. Selain Taiwan, hal ini juga ditunjukkan oleh Cina, terlihat dari upayanya

memadamkan Taiwan melalui kampanye *One Cina* dan mendorong negara-negara lain untuk menyetujuinya, bahkan WHO juga dikabarkan demikian.

Dalam Ekonomi Politik Hubungan Internasional, Robert Gilpin: 1987, misalnya, menggambarkan nasionalisme ekonomi sebagai berikut: "Gagasan utamanya adalah bahwa kegiatan ekonomi adalah dan harus tunduk pada tujuan pembangunan negara. dan kepentingan negara." Demikian pula, dalam bukunya yang lebih baru, *Ekonomi Politik Global*, Gilpin: 2001 berpendapat bahwa inti analisis nasionalisme ekonomi adalah sama dengan "realisme negara-sentris"; ia "mengakui sifat anarkis urusan internasional, keunggulan negara dan kepentingannya dalam urusan negara." hubungan internasional, dan pentingnya kekuasaan dalam hubungan antar negara." Dengan rumusan ini, Gilpin dan lain-lain menggambarkan nasionalisme ekonomi sebagai tradisi pemikiran statistik yang berakar pada doktrin merkantilis abad ke-17 dan ke-18. Cina dengan kemampuan hubungan ekonomi dan politiknya dengan berbagai negara menyudutkan Taiwan dengan membatasi hubungan Taiwan dengan dunia global melalui aliansi politiknya dengan memburu sekutu diplomatik yang tersisa, hal ini terlihat dari keterlambatan WHO dalam mengidentifikasi virus yang dapat diperoleh lebih lanjut. cepat dari Taiwan, yang melaporkan tentang virus ini terlebih dahulu.

Namun Taiwan juga melakukan praktik merkantilis dengan proteksionisme untuk mengisolasi negaranya dari ancaman Covid-19. Merkantilis mengikuti sejarah mereka dalam berargumen bahwa kesejahteraan negara ditentukan oleh aset negara yang ditujukan untuk keamanan negara. Di masa pandemi ini, posisi keamanan atau kesejahteraan negara adalah mencegah penyebaran virus dan menghindari kelangkaan alat kesehatan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Taiwan memberlakukan travel ban untuk mencegah penyebaran dan mengambil alih sektor produksi masker dalam rangka menjaga stabilitas travel bans untuk mencegah penyebaran dan mengambil alih sektor produksi masker dalam rangka menjaga stabilitas guna mengendalikan suplai dan permintaan alat kesehatan dengan harga terjangkau di dalam negeri. Namun, kebijakan ini dilakukan bersama dengan penegakan hukum yang kuat dan teknologi serta kapasitas *Big Data* yang dimaksimalkan. Hasilnya, Taiwan telah melakukan sinergi yang baik dan efektif dalam menekan perkembangan Covid-19 di negaranya dan telah menunjukkan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Masalah di negara lain yang bukan soal pandemi bisa diselesaikan dengan pendekatan kebijakan tiga sinergi ini. Cara Taiwan menghadapi Covid-19 bisa menjadi solusi strategis untuk kepentingan nasional. Demokrasi menghasilkan komunikasi yang kooperatif dan transparansi data yang lengkap dan komprehensif menciptakan kepercayaan publik kepada negara atas data pribadi yang telah diberikan. Ini mengarah pada

kepatuhan yang lebih tinggi untuk mendukung penegakan hukum yang kuat. Jika dikelola dengan baik, strategi domestik ini akan memberikan perbaikan di segala aspek keamanan dan ekonomi yang menunjukkan kesan *good governance* di tingkat internasional. Proses tata kelola kolaboratif ini harus berorientasi pada konvensi dan deliberatif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam upaya menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan teori yang digunakan. Dengan memaparkan kejadian Covid-19 dari episentrum dan terdekatnya yaitu Taiwan, penulis ingin mengkaji pendekatan yang dilakukan Taiwan untuk mengendalikan jumlah Covid-19 meskipun dekat dengan sumber awal wabah ini. Data yang diperoleh dokumen tersebut berasal dari penelusuran literatur dengan sumber dari buku, jurnal, berita, dan media online serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian.

## HASIL

Taiwan menggunakan kolaborasi elemen pemerintah dan non-pemerintah secara efektif. Dari media yang jelas dan pengarahannya pemerintah, dan penanganan korban yang terinfeksi secara efisien, hingga kehadiran pemerintah dalam proses penyembuhan korban dan pemulihan ekonomi. Strategi domestik yang berhasil menarik perhatian internasional telah menggagalkan dukungan untuk pengakuan kedaulatan sebagai pemenuhan kepentingan Taiwan. Kebijakan Taiwan ini terbagi menjadi 4 strategi, yaitu; Tindakan pencegahan dini, Memaksimalkan *Big Data*, dukungan nyata dari pemerintah dan keanggotaan Taiwan di WHO.

### *Langkah Pencegahan Dini*

"Karena pelajaran keras yang didapat Taiwan selama epidemi SARS pada tahun 2003, Taiwan lebih siap menghadapi wabah virus corona daripada banyak negara lain," kata seorang profesor kesehatan masyarakat di Oregon State University di AS, Dr. Chunhuei Chi. Pada tahun 2004, setahun setelah wabah SARS, pemerintah Taiwan mendirikan Pusat Komando Kesehatan Nasional/*National Health Command Center* (NHCC). NHCC adalah bagian dari pusat manajemen bencana yang berfokus pada respons terhadap wabah besar dan bertindak sebagai titik komando operasional untuk komunikasi langsung antara otoritas pusat, regional dan lokal. NHCC menyatukan sistem komando pusat yang mencakup Pusat Komando Epidemi Pusat/*Central Epidemic Command Center* (CECC), Pusat Komando Bencana Patogen Biologis, Pusat Komando Kontra-Bioterrorisme, dan Pusat Operasi Darurat Medis Pusat.

Taiwan pada 31 Desember sebenarnya tahu tentang adanya penyakit menular dari orang ke orang. Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan tidak hanya

mencurigai bahwa orang menyebarkan penyakit satu sama lain, mereka juga memberi tahu WHO tentang kecurigaan mereka melalui jendela pelaporan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR), sebuah platform bagi badan PBB untuk berbagi informasi dan pembaruan. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan kepada Tim Culp dari Bloomberg bahwa mereka mencoba untuk mendapatkan klarifikasi dari IHR tentang apa yang terjadi di Wuhan, tetapi tanggapan dari WHO tidak menanggapi lebih lanjut dan Taiwan tidak pernah mendengar jawaban lagi setelah itu.

Sementara negara lain masih mempertimbangkan kebijakan apa yang harus diambil terkait virus ini, Taiwan telah menerapkan setidaknya 124 kebijakan untuk melindungi kesehatan rakyatnya. Dalam artikel CNN di antara langkah-langkah awal yang menentukan adalah keputusan untuk melarang perjalanan dari banyak bagian Cina, menghentikan kapal pesiar berlabuh di pelabuhan pulau, dan memberlakukan hukuman tegas bagi siapa pun yang ditemukan melanggar perintah karantina rumah. Artikel JAMA lebih lanjut dilengkapi termasuk kontrol perbatasan dari udara dan laut, identifikasi kasus (menggunakan data dan teknologi baru), karantina kasus yang mencurigakan, penemuan kasus proaktif, alokasi sumber daya (menilai dan mengelola kapasitas), jaminan dan pendidikan publik sambil memerangi informasi yang salah. Pelanggaran, negosiasi dengan negara dan wilayah lain, perumusan kebijakan terhadap sekolah dan pengasuhan anak, dan bantuan untuk bisnis. Artikel itu juga menyinggung keengganan WHO menerima informasi dari Taiwan. Pemerintah Taiwan memberlakukan larangan perjalanan pada pengunjung dari Cina, Hong Kong dan Makau segera setelah jumlah kasus virus corona mulai meningkat di daratan Cina.

#### *Maksimalisasi Big Data*

Sebagaimana diakses dari Journal of American Medical Association, pada 27 Januari, Administrasi Asuransi Kesehatan Nasional/*National Health Insurance Administration* (NHIA) dan Badan Imigrasi Nasional mengintegrasikan riwayat perjalanan 14 hari terakhir pasien dengan data kartu identitas NHI mereka dari NHIA; ini dicapai dalam 1 hari. Sistem pendaftaran rumah tangga Taiwan dan kartu masuk orang asing memungkinkan pemerintah melacak individu yang berisiko tinggi karena riwayat perjalanan baru-baru ini di daerah yang terkena dampak. Mereka yang teridentifikasi berisiko tinggi (karantina di rumah) dipantau secara elektronik melalui ponsel mereka.

Pada Tanggal 30 Januari, database NHIA diperluas untuk memasukkan 14 hari terakhir riwayat perjalanan pasien dari Cina, Hong Kong, dan Makau. Pada 14 Februari, Sistem Karantina Masuk diluncurkan, memungkinkan para pelancong untuk mengisi formulir pernyataan kesehatan dengan memindai kode QR yang mengarah ke formulir online, baik sebelum keberangkatan dari atau pada saat kedatangan di bandara

Taiwan. Kartu pernyataan kesehatan seluler kemudian dikirim melalui SMS ke telepon menggunakan operator telekomunikasi lokal, memungkinkan izin imigrasi lebih cepat bagi mereka yang memiliki risiko minimal. Sistem dibuat dalam 72 jam. Pada 18 Februari, pemerintah mengumumkan bahwa semua rumah sakit, klinik, dan apotek di Taiwan akan memiliki akses ke riwayat perjalanan pasien.

Dilihat dari sisi pengadaan alat kesehatan, untuk mengantisipasi tingginya permintaan masker pada akhir Januari lalu, pemerintah Taiwan mulai menjatah pasokan masker yang ada. Produksi masker diambil alih oleh negara dan warga Taiwan dapat pergi ke toko obat yang ditunjuk di seluruh pulau untuk berbaris dan membeli sejumlah masker setiap minggu menggunakan kartu identitas atau surat keterangan domisili. "Taiwan meningkatkan kekuatan sektor manufakturnya dan menginvestasikan sekitar \$6,8 juta (€6 juta) untuk membuat 60 lini produksi masker baru," kata Chi. "Ini meningkatkan kapasitas produksi harian Taiwan dari 1,8 juta masker menjadi 8 juta masker. Ini disebut "*Taiwan Mask Miracle*". CECC berperan aktif dalam alokasi sumber daya, termasuk menetapkan harga masker dan menggunakan dana pemerintah dan personel militer untuk meningkatkan produksi masker. Pada 20 Januari, CDC Taiwan mengumumkan bahwa pemerintah telah mengendalikan 44 juta masker bedah, 1,9 juta masker N95, dan 1.100 ruang isolasi tekanan negatif.

#### *Dukungan Nyata Pemerintah*

Pemerintah Taiwan juga memberikan dukungan bagi mereka yang dikarantina. Pemimpin desa setempat akan membawa sekantong persediaan dasar seperti makanan atau buku kepada individu yang dikarantina. Karena sebagian besar karantina diberlakukan, pemerintah Taiwan juga telah meluncurkan program kesejahteraan yang memberikan tunjangan harian sebesar \$30 bagi mereka yang terkena karantina selama dua minggu. Selain konferensi pers harian oleh menteri kesehatan dan kesejahteraan CECC, wakil presiden Taiwan, seorang ahli epidemiologi terkemuka, menyediakan pengumuman layanan masyarakat reguler yang disiarkan dari kantor presiden dan tersedia melalui internet. Pengumuman tersebut meliputi kapan dan di mana harus memakai masker, pentingnya mencuci tangan, dan bahaya menimbun masker agar tidak tersedia bagi petugas kesehatan di garda terdepan. CECC juga membuat rencana untuk membantu sekolah, bisnis, dan pekerja cuti.

Taiwan *FactCheck Center*, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pembongkaran disinformasi di Taiwan, dengan cepat memberi tahu masyarakat umum tentang kampanye disinformasi ini, yang sebagian besar ditujukan kepada pemerintah Taiwan. Informasi dari media dijaga ketat oleh pemerintah untuk menghindari hoax dan kepanikan masyarakat melalui *FactCheck Center*. Secara khusus, tanggapan cepat dan transparan Taiwan – dengan pejabat medis mengadakan

pengarahan harian tentang masalah ini – telah menjadi contoh bagaimana demokrasi masih dapat mengendalikan epidemi, bahkan ketika beberapa orang mengklaim hanya pemerintah otoriter seperti Cina yang dapat secara efektif mengendalikan virus yang sedang menyebar. sangat cepat. Taiwan juga menghindari jenis penguncian ketat yang menjadi ciri respons di Cina dan banyak negara lain. Dr. Jason Wang menyimpulkan, "Begitulah cara negara demokrasi menangani karantina selama wabah virus corona, dan itu sangat berbeda dari pemerintah otoriter. Saya pikir ini adalah kasus di mana negara-negara demokrasi harus memanfaatkan data dan teknologi mereka dengan benar, sehingga mereka bisa mendapatkan orang ditarik ke tempat yang tepat dan menindaklanjuti dengan perawatan yang tepat."

#### *Keanggotaan Taiwan di WHO*

Keberhasilan Taiwan dan respon yang cepat seharusnya dapat membantu negara lain dalam menangani COVID-19. Alasan mengapa hal ini tidak terjadi masih belum jelas. Namun, salah satu faktor potensial yang ditunjukkan oleh banyak pengamat adalah bahwa Taiwan, tidak seperti kebanyakan pemerintah lainnya, bukanlah anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Taiwan diklaim oleh Cina sebagai bagian dari wilayahnya, dan Beijing mencegah Taiwan untuk berpartisipasi dalam banyak organisasi internasional kecuali jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip "Satu Cina" yang mengaburkan pemisahan pulau dari daratan, Cina, seperti sebagai menyebut dirinya "Cina Taipei" di Cina. Olimpiade. Taiwan dulunya memiliki status pengamat di WHO hingga 2016 tetapi pemilihan resmi Presiden Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik yang secara tradisional pro-kemerdekaan telah disertai dengan peningkatan tekanan terhadap Taipei oleh Beijing dan unjuk kekuatan militer. Natasha Kassam, pakar Cina, Taiwan dan Diplomasi di Lowy Institute Australia, mengatakan bahwa pada awal pandemi virus corona, kurangnya saluran langsung dan tepat waktu ke WHO "mengakibatkan pelaporan kasus yang tidak akurat di Taiwan," dengan pejabat WHO. tampaknya mengandalkan angka-angka dari Beijing. Dia mengatakan bahwa otoritas Taiwan telah mengeluhkan kurangnya akses ke data dan bantuan WHO. Kurangnya informasi mungkin telah memaksa Taiwan untuk melakukannya sendiri dan membuat keputusan dari awal secara independen dari panduan WHO dan konsensus internasional yang lebih luas. Taiwan masih harus bekerja untuk mendapatkan pengakuan ini dan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pengaruh pada anggota lainnya. Jika dilihat dari tiga kebijakan utama sebelumnya dan bagaimana Taiwan menjalankannya dengan baik, Taiwan akan mendapatkan pengakuan tambahan di tingkat internasional yang berarti akan memperlancar kepentingan nasionalnya untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Wang mengatakan Taiwan telah berbagi strategi pencegahan

epidemi mereka dengan negara lain melalui tele-konferensi, sambil membantu negara-negara yang tidak memiliki kemampuan medis canggih untuk memproses sampel dari pasien. Menurut Chi, WHO membutuhkan Taiwan lebih dari Taiwan membutuhkan WHO dalam memerangi virus corona.

Taiwan juga melakukan diplomasi topeng ke beberapa negara. Di bawah kerangka persahabatan lintas partai, Taiwan memberikan bantuan kepada rumah sakit umum dan sekolah di Jepang. Sebagai bagian dari *New Southbound Policy* (NSP) sebanyak 1 juta masker disumbangkan ke Asia Tenggara. Kanada berterima kasih atas bantuan masker dari Taiwan. Uni Eropa memuji Taiwan karena berhasil menahan penyebaran Covid-19 dengan strategi domestiknya. Departemen Luar Negeri AS mengatakan hal yang sama dan menyebabkan Presiden Trump menyuarakan dukungan dan pengakuan terhadap Taiwan di forum internasional. Penting bagi Taiwan untuk mengumpulkan dukungan dan menjaga hubungan baik dengan banyak negara lain demi stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut.

#### **SIMPULAN**

Dapat dipelajari bahwa demokrasi di bawah proteksionisme kepentingan nasional dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi. Terlepas dari proteksionisme merkantilisnya, Taiwan telah menunjukkan kemampuannya untuk mengontrol rakyatnya yang jika dilihat dari perspektif liberal mungkin merupakan pelanggaran terhadap kebebasan individu rakyat. Semua warga terdaftar dan dilacak kebutuhannya untuk pemetaan penyebaran virus. Dalam berita yang beredar, tidak ada reaksi negatif dari masyarakat Taiwan terhadap kebijakan ini. Jika saat itu orang protes karena hak privasinya diganggu, maka mungkin proses pemetaan dan penanganan virus tidak akan seefektif ini. Taiwan juga menyediakan semua yang dibutuhkan termasuk FactCheck. Nick Monaco, Direktur Digital Intelligence Lab di Institute for the Future mengatakan bahwa komunikasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat sipil di Taiwan membantu menangkalkan kampanye disinformasi. Di tengah krisis, pemerintah dihadapkan pada keputusan sulit yang penuh ketidakpastian dan terburu-buru oleh waktu. Keputusan ini harus tepat dan mengatasi akar penyebab masalah yang dihadapi. Taiwan dapat dijadikan contoh respon suatu negara terhadap krisis. Cara negara mendefinisikan krisis membantu bagaimana solusi terstruktur. Tiga faktor penting dari cara Taiwan menghadapi Covid yang dapat menjadi resep untuk mengakselerasi kepentingan nasional dalam melindungi masyarakat dan keberlanjutan negara adalah; Demokrasi dan Transparansi, Pemaksimalan Big Data, dan penegakan hukum yang kuat. Dengan catatan proteksionisme dan penggunaan informasi pribadi hanya dilakukan sementara pada masa krisis sebagai instrumen, dilakukan secara transparan untuk memulihkan perekonomian dan stabilitas negara dari ancaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balaam, David N., and Michael Veseth, 1996. *Introduction to International Political Economy*. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall
- Culpan, Tim 2020, *Taiwan's Viral Success Makes It Harder to Ignore*. Diakses pada 28 April 2020 melalui <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-05/taiwan-s-advance-on-who-in-covid-19-shows-its-place-in-world>
- Gilpin, Robert, and Jean M. Gilpin. 1987. *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Princeton University Press.
- Gilpin, Robert, and Jean M. Gilpin. 2001. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton University Press, <https://doi.org/10.2307/j.ctvc4j53>.
- Griffiths, James, 2020, *Taiwan's coronavirus response is among the best globally*. *CNN*. Diakses pada February 20 2020 melalui <https://edition.cnn.com/2020/04/04/asia/taiwan-coronavirus-response-who-intl-hnk/index.html>
- Guterres, Antonio, 2020, *COVID-19: We will come through this together*, Diakses pada 20 Maret 2020 melalui <https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-we-will-come-through-together>
- Helleiner, Eric. 2002, Economic Nationalism as a Challenge to Economic Liberalism? Lessons from the 19th Century. *International Studies Quarterly*, 46(3), 307-329
- Japan Data. 2021, *Coronavirus Cases in Japan by Prefecture* <https://www.nippon.com/en/japan-data/h00657/coronavirus-cases-in-japan-by-prefecture.html?pnun=2>
- NHCC [National Health Command Center]. 2018, *Taiwan Centers for Disease Control*. Diakses 4 April 2020 melalui <https://www.cdc.gov.tw/En/Category/MPage/gL7-bARtHyNdrDq882pJ9Q>
- Pan T, Yeh J. 2019. Number of Taiwanese working in Cina hits 10-year low. *Focus Taiwan*. Diakses 1 Februari 2020 melalui <https://focustaiwan.tw/business/201912170022>
- Policy Brief FISIPOL UGM Seri I COVID-19 <http://fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1056/2020/04/Policy-Brief-Problematika-Kebijakan-Krisis-COVID-19-di-Indonesia.pdf>
- Policy Brief: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19 . [https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Policy-Brief\\_Akuntabilitas-Penanganan-Pandemi-COVID19.pdf](https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Policy-Brief_Akuntabilitas-Penanganan-Pandemi-COVID19.pdf)
- Wang S , Lin K, 2020, Foreign visitors to Taiwan up 7% in 2019. *Focus Taiwan*. Diakses 20 February 2020 melalui <https://focustaiwan.tw/society/202001060014>.
- Wang CJ, Ng CY, Brook RH. 2020, Response to COVID-19 in Taiwan: Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing. *JAMA*. 323(14), 1341–1342. doi:10.1001/jama.2020.3151
- WHO coronavirus (COVID-19) Dashboard. Diakses 20 Februari 2020 melalui [https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQjwoaz3BRDnARIsAF1RfLc4F67-faifGQHF7ouQTLzVtCNejN0Ci6K1rFjkd0jYvAWZ1dOywJMaAm4nEALw\\_wcB](https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQjwoaz3BRDnARIsAF1RfLc4F67-faifGQHF7ouQTLzVtCNejN0Ci6K1rFjkd0jYvAWZ1dOywJMaAm4nEALw_wcB)
- Yang, William. 2020. How has Taiwan kept its coronavirus infection rate so low? *DW*. Diakses 20 February 2020. Melalui <https://www.dw.com/en/taiwan-coronavirus/a-52724523> diakses pada 28 April 2020